

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, Jurnal, Makalah**

- Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, et al., 2011, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Atep Adya Barata, 2005, *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Bohari.H, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Tanpa Penerbit, Makassar.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Dian Puji Simatupang, 2007, "*Hak Menguasai Negara dalam Keuangan Publik, Konsep, Teori, dan Praktik*" bahan perkuliahan hukum anggaran negara, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Goedhart. C, 1975, *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Cetakan Ketiga, Djambatan, Jakarta.
- H. Abdul Latief, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Harry Azhar Azis, 2016, *Audit Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Pusat Kajian Keuangan Negara, Jakarta.
- Harun, 2009, *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Alumni, Bandung.
- Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

- Maria Farida Indrati. S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- MN Azmy Achir, 1975, *Masalah Pengurusan Keuangan Negara Suatu Pengantar Teknis*, CV Yulianti , Bandung.
- Muhammad Djafar Saidi, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nindyo Pramono, 2006, “*Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN*” dalam *Persembahan kepada Sang Maha Guru “Permasalahan Seputar Hukum Bisnis”*, Yogyakarta.
- Philippus M. Hadjon, 1998, “*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*”, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, Jakarta.
- Ridwan HR., 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sapto Amal Damandari, 2017, *Berbakti Untuk Negara Mengabdikan Untuk BPK*, Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S.F. Marbun, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance*, Mandar Maju, Bandung.
- Soehino, 2006, *Hukum Tata Negara; Teknik Perundang-undangan (Setelah Dilakukan Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, BPFE, Yogyakarta.
- Subagio. M, 1988, *Hukum Keuangan Negara R.I.*, Cetakan Pertama, CV Rajawali, Jakarta.
- Suriansyah Murhani, 2008, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Theodorus M. Tuanakota, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang Disatukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 dan 4150.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934.

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147.

### Internet

Soepomo, *Pemahaman Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*,  
<http://www.djkn.depkeu.go.id/index.php/20070822156/Kekayaan-Negara/Pemahaman-Keuangan-Negara.html>

Abdul Salam, *Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*,  
<http://staff.blog.ui.ac.id/abdul.salam/2008/07/07/perbuatan-melawan-hukum-penguasa>.

Kurnianto Purnomo, *Apa Arti Perbuatan Melawan Itu*,  
[http://www.progresifjaya.com/NewsPage.php?judul=APA-ARTI-PERBUATAN-MELAWAN-HUKUM-ITU&kategori\\_tulisan=Opini](http://www.progresifjaya.com/NewsPage.php?judul=APA-ARTI-PERBUATAN-MELAWAN-HUKUM-ITU&kategori_tulisan=Opini).